



Program Sekolah Gratis Mulai Jalan

Tunda Investasi, Gunakan Dana Cadangan

JOGJA-- Program peng-
 gratisan biaya operasional
 sekolah yang digulirkan oleh
 pemerintah pusat diakui cukup
 memadai bagi sejumlah seko-
 lah. Rencana Anggaran, Pen-
 dapatan, dan Belanja Sekolah
 (RAPBS) yang telah dibuat pun
 tak lagi bisa digunakan. Untuk
 menutupi biaya kegiatan opera-
 sional hingga dana BOS daerah
 (BOSDA) yang dijanjikan dari
 APBD Kota Jogja turun, seju-
 mlah sekolah menggunakan dana
 "cadangan" yang mereka miliki.

Di SD Negeri Serayu, ke-
 giatan operasional saat ini
 dibiayai dengan dana cadangan
 yang merupakan pinjaman dana
 yang telah terkumpul dari Komite
 Sekolah. Dana tersebut, menurut
 Kepala SDN Serayu Dra Erna
 Krumaningih, hanya dipinjam
 dan nantinya akan dikembalikan
 lagi kepada Komite Sekolah jika
 BOSDA sudah turun.

Menurutnya, dana pinjaman
 dari Komite Sekolah-- yang telah
 terkumpul sebelum Surat Edaran
 dari Mendiknas RI tentang
 penggratisan biaya operasional
 turun-- dialokasikan untuk
 sejumlah pos, seperti biaya ujian
 untuk kelas 6, pembelian ATK,
 biaya kegiatan TPA, dan les
 renang.

1. V "Kegiatan seperti renang
 2. V tetap diadakan meskipun freku-
 3. S ensinya dikurangi. Selain itu,
 4. A masih ada kegiatan lain yang
- dibiayai orangtua karena mem-
 ang kegiatan tersebut dari
 pihak luar, bukan pihak sekolah.

Misalnya les biola, komputer,
 sempoa, dan bahasa Inggris.
 Sementara untuk pembangunan
 gedung, pengadaan buku, dan
 lainnya kami dibiayai pemerintah
 melalui DAK (Dana Alokasi
 Khusus, red)," terang Erna
 ketika ditemui di ruang kerjanya,
 Selasa (17/2). Di sisi lain, Erna
 juga berpendapat, sebenarnya
 tidak akan adil jika besaran BOS
 disamaratakan bagi semua siswa.

"Tidak adil kalau BOS disa-
 maratakan bagi sekolah maju dan
 yang belum maju, bagi siswa
 yang kaya dan yang kurang
 mampu," tambahnya.

Sementara itu, Kepala SMP
 Negeri 13 Jogja Suprptama SPd
 menampik adanya pemberitaan
 bahwa pembangunan gedung di
 sekolah tersebut berhenti karena
 kebijakan baru tersebut. Ia
 mengaku, saat ini pembangunan
 fasilitas gedung perpustakaan
 (bukan pembangunan tambahan
 kelas, red.) masih tetap berjalan.

"Kebijakan tersebut memang
 jelas berpengaruh, tapi saat ini
 pembangunannya tetap masih
 berjalan. Tapi memang kalau
 dulu misalnya ada 12 tukang yang
 kami pekerjakan, sekarang cukup
 lima orang. Pembangunan dimu-
 lai bulan November 2008 dan
 saat ini telah 60 persen selesai,"
 ungkap Suprptama di ruang
 kerjanya, kemarin.

Seperti diberitakan di Bemas
 Jogja edisi Selasa (17/2) kemarin,
 Rapat Kerja Komisi I dengan
 Dinas Pendidikan di Gedung
 DPRD Kota Yogyakarta, Senin

(16/2) lalu sempat membahas
 tentang belanja modal sekolah
 yang bersifat investasi. Dalam
 rapat yang dipimpin Wakil Ketua
 Komisi I Ardianto dan dihadiri
 Kepala Dinas Pendidikan Drs
 Syamsury MM ini, diungkapkan
 bahwa pembebasan siswa SD
 dan SMP Negeri dari pungutan
 membuat sekolah tidak lagi
 leluasa melakukan investasi,
 seperti menambah gedung dan
 fasilitas lain. Saat itu, dicon-
 tohkan SMPN 13 yang meng-
 hentikan pembangunan tamba-
 han kelas yang sudah se-
 tengah jadi.

Suprptama mengungkap-
 kan, sebelum ada kebijakan
 larangan pungutan tersebut,
 Komite Sekolah telah mene-
 tapkan dana *sharing* sebesar Rp
 1 juta per siswa, kecuali siswa
 pemegang Kartu Menuju Sejah-
 tera (KMS). Hanya saja, hingga
 Desember 2008 lalu baru 38 siswa
 yang membayar. Setelah ada
 kebijakan sekolah gratis, menu-
 rutnya, ada pemahaman yang
 berbeda dari orangtua siswa.
 Kesepakatan tentang dana *shar-*
ing yang telah ditetapkan sebe-
 lum ada kebijakan tersebut pun
 sulit dilakukan, otomatis dana
sharing yang terkumpul tidak
 memenuhi target.

"BOSDA tidak boleh digu-
 nakan untuk pembangunan
 gedung, hanya boleh digunakan
 untuk rehab ringan dan biaya
 operasional lain termasuk biaya
 untuk mengikuti kegiatan per-
 lomba," tambahnya. (ovi)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Humas dan Informasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pendidikan			

Yogyakarta, 18 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005